

**LAPORAN AKHIR PERTEMUAN 12 STATISTIKA EKONOMI**

**“Analisis Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran  
Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung Tahun 2016–2025”**

**Dosen Pengampu:**

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Meyta Pritandari, S.Pd., M.Pd.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



**Disusun Oleh Kelompok 3:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Silviana Febriani       | 2413031075 |
| 2. Grescie Odelia Situkkir | 2413031088 |
| 3. Sofia Dilara            | 2413031091 |
| 4. Melinda Dwi Safitri     | 2413031092 |
| 5. Siti Haryanti           | 2413031094 |
| 6. Della Puspita           | 2453031007 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja.

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP merupakan standar upah minimum yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan UMP dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi perekonomian daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak, namun di sisi lain kenaikan UMP juga sering dikaitkan dengan kemungkinan bertambahnya biaya produksi yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Di Provinsi Lampung, nilai UMP mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2025, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, terutama pada masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran tidak selalu sejalan dengan perubahan UMP. Selain dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum, tingkat pengangguran juga dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kondisi pasar kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan kedua variabel tersebut serta menjadi tambahan informasi dalam memahami kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

## **1.2 Tujuan Analisis**

1. Menjelaskan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025.
2. Menjelaskan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025.
3. Menganalisis hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025.
4. Mengetahui tingkat keeratan hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan hasil analisis statistik.

## **1.3 Pernyataan Riset atau Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025?
2. Bagaimana perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025?
3. Apakah terdapat hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung?
4. Seberapa kuat hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan hasil analisis statistik?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai batas terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Penetapan UMP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan. Sementara itu, pemerintah menetapkan UMP berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, dan kebutuhan hidup layak.

Secara ekonomi, kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja karena pendapatan yang diterima menjadi lebih tinggi. Namun, apabila kenaikan upah tidak diimbangi dengan produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja atau menunda perekrutan tenaga kerja baru untuk menekan biaya produksi.

#### **Indikator UMP**

- Besaran UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi.
- Persentase kenaikan UMP setiap tahun.
- Kemampuan UMP dalam memenuhi kebutuhan hidup layak.

#### **2.2 Teori Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

TPT sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi TPT menunjukkan semakin banyak

angkatan kerja yang belum terserap ke dalam pasar kerja. Sebaliknya, semakin rendah TPT menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang semakin baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi TPT antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, investasi, perkembangan industri, serta kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

### **Indikator TPT**

- Jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah angkatan kerja.
- Persentase TPT menurut data BPS.

## **2.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Hubungan antara UMP dan TPT menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan. Menurut teori pasar tenaga kerja, kenaikan upah minimum dapat memberikan dua dampak yang berbeda.

Di satu sisi, kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja karena pendapatan yang diterima lebih besar. Di sisi lain, perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja apabila biaya produksi meningkat akibat kenaikan upah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan UMP tidak selalu meningkatkan pengangguran. Kenaikan upah juga dapat mendorong produktivitas pekerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.

Dengan demikian, hubungan antara UMP dan TPT dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada kondisi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan biaya produksi.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

### **Penelitian 1**

Penelitian oleh Mankiw (2018) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Akibatnya, tingkat pengangguran dapat meningkat apabila perusahaan mengurangi jumlah pekerja.

### **Penelitian 2**

Penelitian oleh Borjas (2020) menemukan bahwa kebijakan upah minimum memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap daerah. Di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, kenaikan upah minimum tidak selalu menyebabkan peningkatan pengangguran.

### **Penelitian 3**

Penelitian oleh BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan hanya oleh faktor upah minimum.

#### Ringkasan Penelitian Terdahulu

<b>PENELITI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
Mankiw	2018	UMP berpotensi meningkatkan pengangguran jika biaya tenaga kerja naik signifikan
Borjas	2020	Pengaruh UMP terhadap pengangguran berbeda pada setiap daerah
BPS & KEMANKER	2022	TPT dipengaruhi banyak faktor, tidak hanya UMP

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjamin pekerja memperoleh pendapatan yang layak. Setiap tahun pemerintah

menetapkan besaran UMP yang umumnya mengalami peningkatan. Namun, kenaikan UMP dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Menurut teori pasar tenaga kerja, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan. Jika kenaikan upah dianggap terlalu tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja, menunda perekrutan, atau melakukan efisiensi tenaga kerja. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Di sisi lain, kenaikan UMP juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Peningkatan permintaan tersebut dapat mendorong perusahaan memperluas produksi dan membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat menurunkan TPT.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, UMP diduga memiliki hubungan dengan TPT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara UMP dan TPT di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025.

**Variabel X**

**Variabel Y**

**Upah Minimum Provinsi (UMP) —► Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

## 2.6 Hipotesis

**H<sub>0</sub> (Hipotesis Nol):** Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2016–2025.

**H<sub>1</sub> (Hipotesis Alternatif):** Terdapat hubungan yang signifikan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2016–2025.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah mengolah data dalam bentuk angka untuk dianalisis secara statistik. Melalui metode deskriptif korelasional, penelitian ini bertujuan untuk memotret kondisi riil sekaligus menguji ada atau tidaknya hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung. Karena peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan khusus terhadap data melainkan hanya mengamati data historis yang sudah terjadi, riset ini dikategorikan sebagai penelitian non-eksperimental yang bersifat *ex post facto*. Untuk menjaga fokus analisis, terdapat dua variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian ini:

1. Variabel Bebas (Independent Variable / X): Yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung. Variabel ini merupakan standar upah bulanan terendah yang ditetapkan resmi oleh Gubernur Lampung berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Satuan yang digunakan adalah Rupiah.
2. Variabel Terikat (Dependent Variable / Y): Yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung. Variabel ini menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang siap bekerja dan masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah Persen (%).

Sebagai panduan operasional agar tidak memicu ambiguitas tafsir, detail ringkas mengenai kedua variabel tersebut dirangkum dalam kamus data (*data dictionary*) pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1 Data Dictionary Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
UMP (X)	Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rupiah	BPS dan Pemprov Lampung
TPT (Y)	Persentase penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di Provinsi Lampung	Persen (%)	BPS Provinsi Lampung

### 3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data historis UMP dan TPT yang tercatat secara resmi di wilayah Provinsi Lampung. Karena karakteristik datanya berupa data runtun waktu (*time series*), pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan periode waktu dari tahun 2016 hingga 2025.

Melalui teknik ini, diperoleh 10 titik data tahunan yang dinilai sangat relevan karena datanya tersedia lengkap sekaligus mampu menggambarkan dinamika ekonomi yang beragam mulai dari pertumbuhan normal, masa krisis akibat pandemi COVID-19 (2020-2021), hingga fase pemulihan ekonomi pascapandemi.

Seluruh data yang digunakan berjenis data sekunder, yang berarti peneliti tidak mengambil data langsung di lapangan melainkan memanfaatkan dokumen publik resmi yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mencatat, merangkum, dan mengompilasi laporan berkala yang dipublikasikan oleh instansi berwenang. Data UMP bersumber dari keputusan resmi Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sedangkan data TPT diperoleh dari laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS Provinsi Lampung.

**Tabel 2.2 Data UMP dan TPT Provinsi Lampung Tahun 2016-2025**

Tahun	UMP (Rupiah)	TPT (%)
2016	1.763.000	4,62
2017	1.908.447	4,33
2018	2.074.673	4,04
2019	2.240.646	4,03
2020	2.432.001	4,67
2021	2.432.001	4,69
2022	2.440.486	4,52
2023	2.633.284	4,23
2024	2.716.497	4,19
2025	2.893.070	4,21

*Sumber: BPS Provinsi Lampung & Pemerintah Provinsi Lampung (diolah, 2025)*

### 3.3 Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data yang telah dikompilasi dan menguji hipotesis penelitian, analisis statistik dilakukan secara bertahap menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS. Tahapan analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis Deskriptif: Tahap awal ini digunakan untuk melihat gambaran umum serta tren perkembangan UMP dan TPT dari tahun ke tahun. Agar fluktuasi datanya mudah dipahami, data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik tren.
- b. Uji Korelasi Pearson (*Product Moment*): Pengujian ini difungsikan untuk mengukur seberapa kuat derajat kereratan sekaligus arah hubungan antara UMP dan TPT. Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) yang dihasilkan akan berada di rentang  $-1$  hingga  $+1$ . Angka yang mendekati  $+1$  menunjukkan hubungan positif yang kuat, mendekati  $-1$  menandakan hubungan negatif yang kuat, dan jika mendekati  $0$  berarti tidak ada hubungan yang berarti.

- c. Analisis Regresi Linear Sederhana: Analisis ini diterapkan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel UMP (X) terhadap perubahan TPT (Y). Model persamaan linear yang digunakan mengacu pada rumus berikut:
- $$Y = a + bX + e$$
- Keterangan: Y = Tingkat Pengangguran Terbuka; X = Upah Minimum Provinsi; a = konstanta; b = koefisien regresi; dan e = tingkat kesalahan (error/residual).*
- d. Uji Signifikansi (Uji-t): Langkah terakhir adalah melakukan uji-t untuk memastikan apakah hubungan atau pengaruh yang ditemukan memang valid secara statistik atau hanya kebetulan. Pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPT di Provinsi Lampung.

## BAB IV

### ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

#### 4.1 Penyusunan Dataset

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan sumber resmi pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). Data yang digunakan merupakan data time series Provinsi Lampung periode 2016–2025 dengan dua variabel penelitian, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai variabel independen (X) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel dependen (Y).

**Tabel 4.1 Dataset Penelitian**

Tahun	UMP (Rp)	TPT (%)
2016	1.763.000	4,62
2017	1.908.447	4,33
2018	2.074.673	4,04
2019	2.240.646	4,03
2020	2.432.001	4,67
2021	2.432.001	4,69
2022	2.440.486	4,52
2023	2.633.284	4,23
2024	2.716.497	4,19
2025	2.893.070	4,21

*Sumber: BPS Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung (diolah penulis, 2026).*

#### 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Statistik yang digunakan meliputi nilai rata-rata (mean), median, modus, range, varians, dan standar deviasi.

Statistik	UMP	TPT
Mean	2.353.410,50	4,353
Median	2.432.001,00	4,280
Modus	2.432.001	4,03
Standar Deviasi	358.750,290	0,253
Varians	128.700.000.000	0,064
Range	1.130.070	0,66
Minimum	1.763.000	4,03
Maksimum	2.893.070	4,69

Sumber: Output SPSS (diolah penulis, 2026).

#### 4.3 Interpretasi Statistik Deskriptif Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung selama periode 2016–2025 sebesar Rp2.353.410,50. Nilai UMP tertinggi sebesar Rp2.893.070 terjadi pada tahun 2025, sedangkan nilai terendah sebesar Rp1.763.000 terjadi pada tahun 2016. Rentang (range) sebesar Rp1.130.070 menunjukkan adanya peningkatan UMP yang cukup signifikan selama periode penelitian.

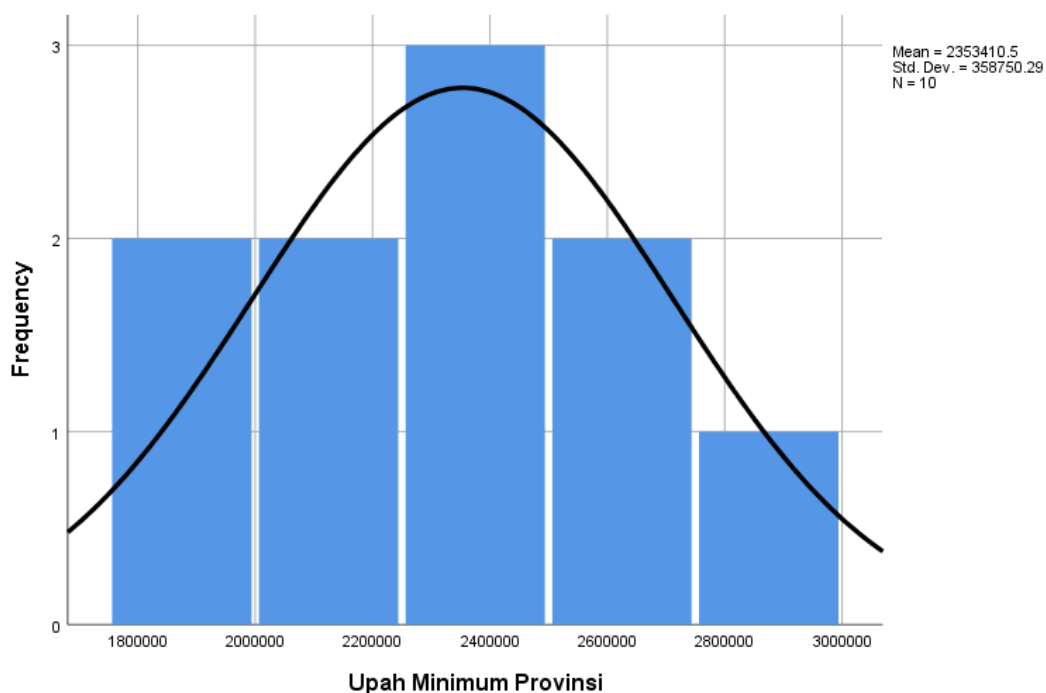
Nilai standar deviasi sebesar Rp358.750,290 menunjukkan bahwa penyebaran data UMP relatif tidak terlalu besar sehingga perubahan UMP dari tahun ke tahun cenderung stabil. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa UMP Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan yang konsisten sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.

#### 4.4 Interpretasi Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung selama periode 2016–2025 sebesar 4,353%. Nilai TPT tertinggi sebesar 4,69% terjadi pada tahun 2021, sedangkan nilai terendah sebesar 4,03% terjadi pada tahun 2019. Rentang (range) sebesar 0,66 menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran selama periode penelitian tidak terlalu besar.

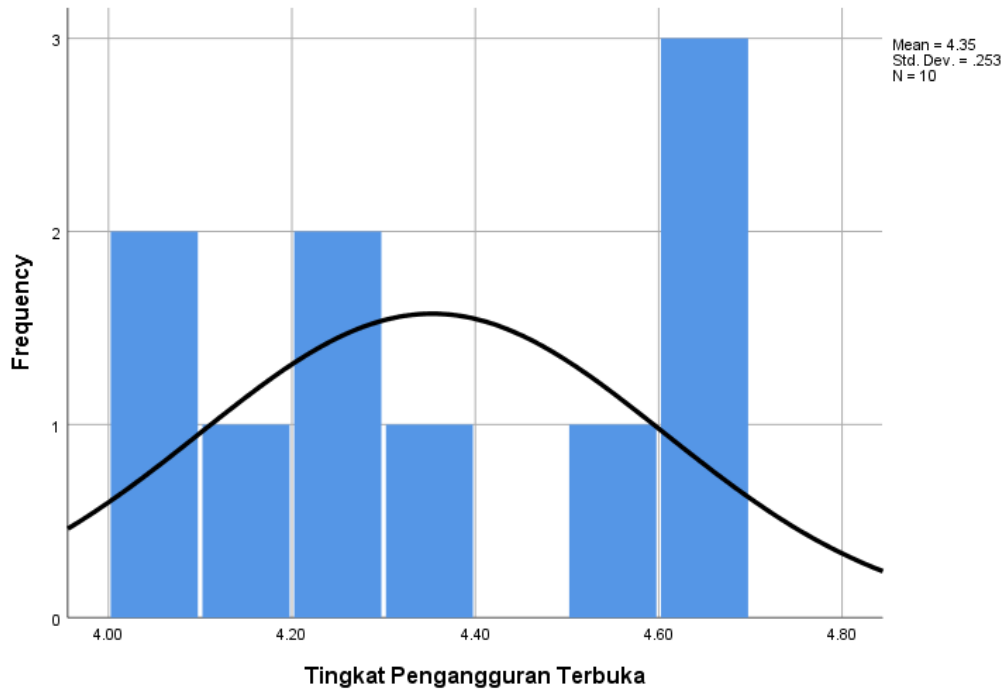
Nilai standar deviasi sebesar 0,253 menunjukkan bahwa penyebaran data TPT relatif rendah sehingga tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung stabil dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi peningkatan TPT pada tahun 2020–2021 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja, secara umum TPT di Provinsi Lampung masih berada pada kisaran 4–5 persen selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Lampung relatif terkendali dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem.

#### 4.5 Histogram Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)



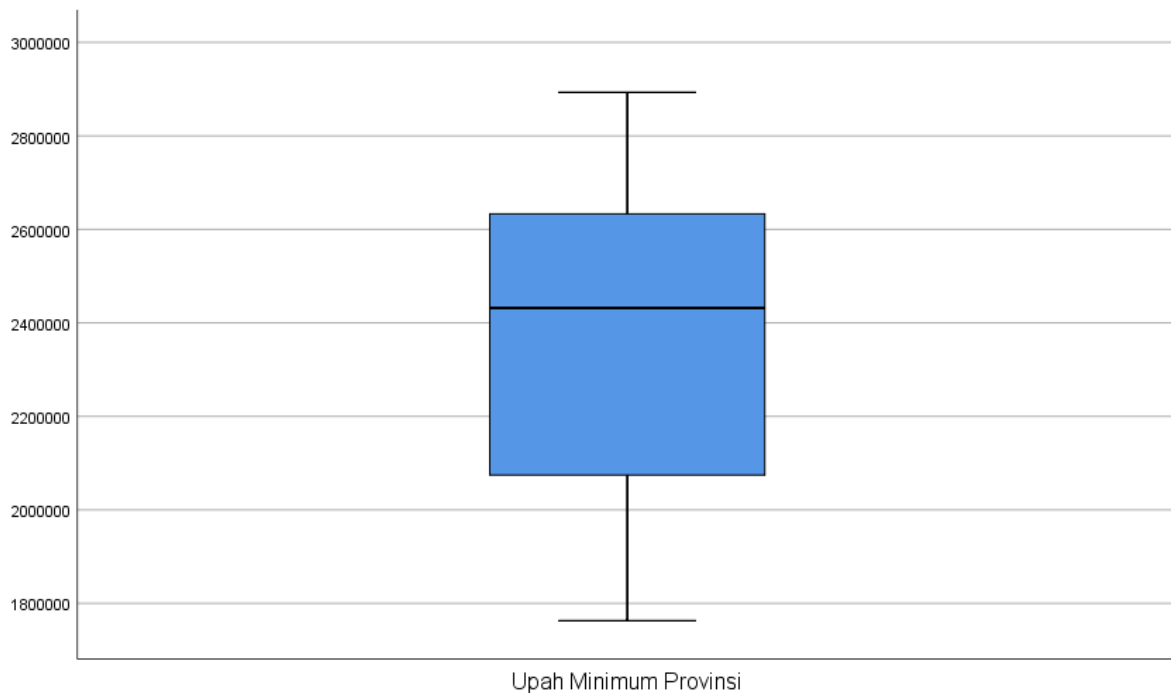
Histogram UMP menunjukkan bahwa nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung selama periode 2016–2025 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagian besar data berada pada kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta, dengan rata-rata sebesar Rp2.353.410,50. Distribusi data terlihat cukup merata dan tidak menunjukkan adanya nilai yang menyimpang secara ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan UMP di Provinsi Lampung dilakukan secara bertahap dan konsisten setiap tahunnya. Secara umum, pola distribusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMP selama periode penelitian relatif stabil dan mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi serta kebutuhan hidup pekerja.

#### 4.6 Histogram Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Histogram TPT menunjukkan bahwa sebagian besar nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung berada pada kisaran 4%–5%, dengan rata-rata sebesar 4,353%. Distribusi data terlihat terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dan tidak menunjukkan penyebaran yang terlalu lebar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025 cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil. Meskipun terjadi peningkatan TPT pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja, perubahan tersebut tidak menyebabkan lonjakan yang terlalu ekstrem. Secara keseluruhan, histogram menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung masih berada dalam batas yang wajar selama periode penelitian.

#### 4.7 Bloxpot Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

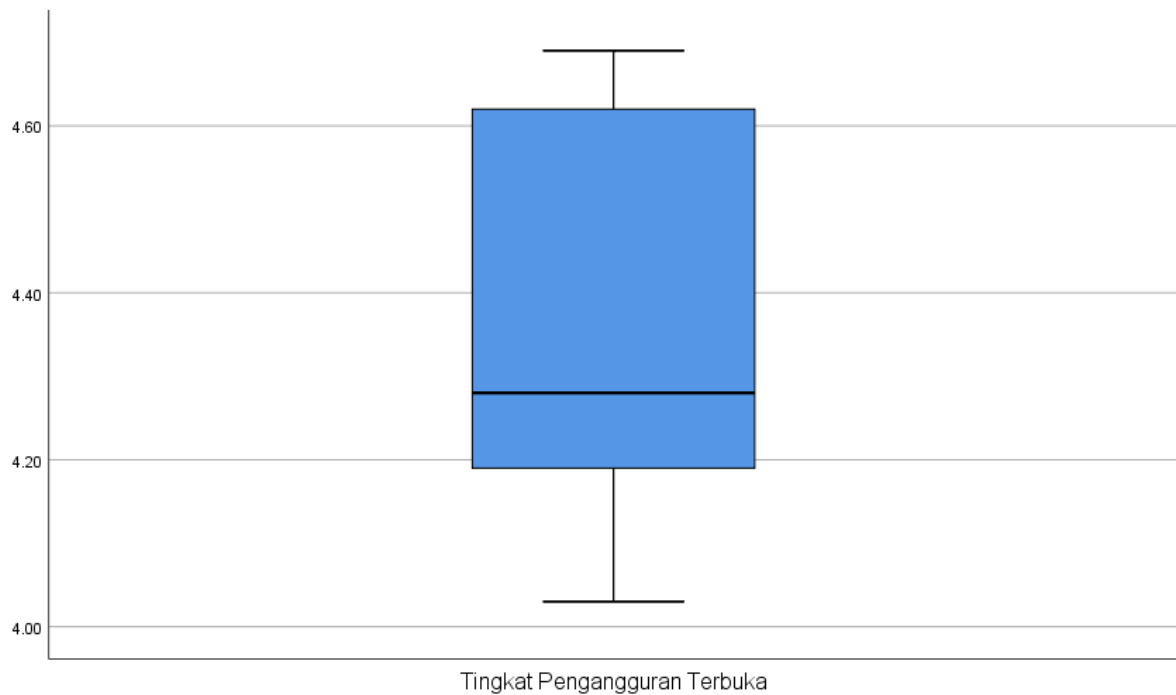


Berdasarkan boxplot Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung periode 2016–2025, tidak ditemukan nilai pencilan (*outlier*) yang ditunjukkan oleh tidak adanya titik atau simbol di luar whisker boxplot. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data UMP berada dalam rentang yang wajar dan tidak terdapat nilai yang menyimpang secara ekstrem.

Selain itu, garis median berada di dalam kotak distribusi data dan sebaran data terlihat cukup merata antara nilai minimum dan maksimum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan UMP di Provinsi Lampung selama periode penelitian berlangsung secara bertahap dan konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, data UMP dapat dianggap representatif dan layak digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut.

Tidak adanya outlier menunjukkan bahwa kebijakan penetapan UMP di Provinsi Lampung dilakukan secara bertahap sehingga tidak terjadi lonjakan upah yang terlalu tinggi dalam satu periode tertentu.

#### 4.8 Bloxpot Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Berdasarkan boxplot Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung periode 2016–2025, tidak ditemukan nilai pencilan (*outlier*) sehingga seluruh data TPT berada dalam rentang yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Lampung selama periode penelitian tidak mengalami perubahan yang ekstrem.

Sebaran data TPT juga terlihat relatif sempit dengan median berada pada kisaran 4,28 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar nilai TPT terkonsentrasi pada rentang yang tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025 cenderung stabil meskipun sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19.

Tidak ditemukannya outlier pada data TPT menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat pengangguran yang terjadi masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu representativitas data penelitian.

## BAB V

### ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL

#### 5.1 Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tahun Penelitian	.096	10	.200 <sup>*</sup>	.970	10	.892
Upah Minimum Provinsi	.187	10	.200 <sup>*</sup>	.967	10	.863
Tingkat Pengangguran Terbuka	.186	10	.200 <sup>*</sup>	.897	10	.203

<sup>\*</sup>. This is a lower bound of the true significance.  
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode **Shapiro-Wilk**, diperoleh nilai signifikansi variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar **0,863**, sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar **0,203**. Nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut lebih besar dari **0,05**.

Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data dapat digunakan untuk analisis statistik lanjutan menggunakan metode parametrik, yaitu uji korelasi Pearson dan regresi linear sederhana.

#### 5.2 Uji Korelasi

		Upah Minimum Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka
Upah Minimum Provinsi	Pearson Correlation	1	-.157
	Sig. (2-tailed)		.665
	N	10	10
Tingkat Pengangguran Terbuka	Pearson Correlation	-.157	1
	Sig. (2-tailed)	.665	
	N	10	10

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi (**r**) sebesar **-0,157** dengan nilai signifikansi (**Sig.**) sebesar **0,665**.

Nilai koefisien korelasi sebesar **-0,157** menunjukkan bahwa hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersifat negatif dengan tingkat hubungan yang sangat lemah. Hubungan negatif tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan UMP cenderung diikuti oleh penurunan TPT, meskipun hubungan tersebut sangat kecil.

Selain itu, nilai signifikansi sebesar  $0,665 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara UMP dan TPT tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, perubahan UMP belum terbukti memiliki hubungan yang bermakna terhadap perubahan TPT selama periode penelitian.

### 5.3 Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan variabel dependen adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

#### a. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.157 <sup>a</sup>	.025	-.097	.26550

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R sebesar 0,157 dan R Square sebesar 0,025. Nilai R sebesar 0,157 menunjukkan bahwa hubungan antara UMP dan TPT tergolong sangat lemah. Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,025 menunjukkan bahwa variabel UMP hanya mampu menjelaskan 2,5% variasi perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan 97,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

#### b. ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.014	1	.014	.202	.665 <sup>b</sup>
	Residual	.564	8	.070		
	Total	.578	9			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka  
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 0,202 dengan nilai signifikansi 0,665. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang terbentuk tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMP belum mampu menjelaskan perubahan TPT secara memadai.

### c. Coefficients dan Persamaan Regresi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.614	.587		7.866	.000
	Upah Minimum Provinsi	-1.110E-7	.000	-.157	-.450	.665

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Tabel 5.5, diperoleh nilai koefisien regresi sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) = 4,614 dengan Std. Error = 0,587, nilai t = 7,866, dan Sig. = 0,000.
- b) Koefisien UMP (b) = -1,110E-7 (atau -0,000000111) dengan t = -0,450 dan Sig. = 0,665.

Dengan demikian, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$TPT = 4,614 + (-1,110 \times 10^{-7}) UMP$$

Konstanta sebesar 4,614 memiliki arti bahwa apabila nilai UMP sama dengan nol (kondisi hipotetis), maka perkiraan TPT di Provinsi Lampung adalah sebesar 4,614 persen. Nilai konstanta ini signifikan secara statistik karena nilai Sig. = 0,000 < 0,05. Koefisien regresi UMP sebesar -1,110E-7 menunjukkan arah negatif, artinya setiap kenaikan UMP sebesar Rp1,00, maka TPT diperkirakan akan turun sebesar 0,000000111 persen, ceteris paribus. Namun demikian, koefisien ini tidak signifikan secara statistik karena nilai Sig. = 0,665 > 0,05 dan nilai t hitung = -0,450 berada jauh di dalam wilayah penerimaan Ho.

## 5.4 Pembahasan Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung selama periode 2016–2025 tergolong sangat lemah dan tidak signifikan. Sebelum dilakukan analisis lanjutan, hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar  $r = -0,157$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,665. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara UMP dan TPT bersifat negatif, namun sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, perubahan UMP belum dapat menjelaskan perubahan TPT secara nyata selama periode penelitian.

Hasil regresi linear sederhana juga menunjukkan hasil yang sejalan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,025 menunjukkan bahwa UMP hanya mampu menjelaskan 2,5% variasi perubahan TPT, sedangkan sisanya sebesar 97,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,665 atau lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan antara UMP dan TPT secara signifikan.

Tidak signifikannya hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur ekonomi Provinsi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan sektor informal menyebabkan perubahan UMP tidak selalu berdampak langsung terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, jumlah observasi yang terbatas serta adanya faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi perubahan TPT.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tidak dapat dijelaskan hanya melalui variabel UMP, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang lebih kompleks.

## 5.5 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data penelitian (UMP dan TPT) di Provinsi Lampung tahun 2016–2025 telah terbukti berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk, sehingga asumsi statistik parametrik terpenuhi.
2. Terdapat hubungan negatif yang sangat lemah dan tidak signifikan antara UMP dan TPT ( $r = -0,157$ ; Sig. = 0,665 > 0,05). Artinya, kenaikan UMP tidak terbukti secara signifikan berhubungan dengan perubahan TPT di Provinsi Lampung selama periode penelitian.

3. Model regresi linier sederhana yang terbentuk adalah  $TPT = 4,614 + (-1,110 \times 10^{-7})$  UMP, namun model ini tidak signifikan secara statistik ( $F = 0,202$ ;  $Sig. = 0,665$ ) dengan kemampuan prediksi yang sangat rendah ( $R^2 = 0,025$  atau 2,5%).
4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan di luar variabel UMP, sehingga diperlukan analisis multivariat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2016–2025, dapat disimpulkan bahwa UMP mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, sedangkan TPT mengalami perubahan yang relatif stabil meskipun sempat meningkat pada periode pandemi COVID-19.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa hubungan antara UMP dan TPT memiliki arah negatif dengan tingkat hubungan yang sangat lemah ( $r = -0,157$ ) dan tidak signifikan secara statistik (Sig. = 0,665). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMP belum terbukti memiliki hubungan yang signifikan terhadap perubahan TPT di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, UMP hanya mampu menjelaskan 2,5% variasi perubahan TPT, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor upah minimum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketenagakerjaan lainnya.

#### **6.2 Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan hasil analisis, peningkatan UMP tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sehingga kebijakan pengupahan perlu dipadukan dengan strategi lain yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dalam penerapannya, upaya mengurangi tingkat pengangguran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemerintah dan pihak swasta perlu memperkuat kerja sama dalam menciptakan peluang

kerja baru agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran secara lebih luas. Mengingat TPT tidak hanya dipengaruhi oleh UMP, maka analisis berikutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pendidikan, dan perkembangan sektor industri untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

### **6.3 Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung tahun 2016–2025, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan pengupahan secara lebih menyeluruh dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah, kemampuan dunia usaha, serta kesejahteraan pekerja. Penetapan UMP sebaiknya berjalan seiring dengan kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

2. Penguatan program peningkatan kompetensi tenaga kerja

Pemerintah perlu memperluas program pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kompetensi masyarakat agar tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

3. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi penyerap tenaga kerja

Pengembangan sektor usaha yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan perlu menjadi perhatian. Peningkatan investasi dan dukungan terhadap dunia usaha dapat membantu memperluas kesempatan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran.

4. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan

Kerja sama antar pihak terkait diperlukan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih efektif. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan

pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri sehingga penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal.

#### **6.4 Saran Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pendidikan, jumlah industri, serta faktor ketenagakerjaan lainnya. Hal ini dikarenakan perubahan tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang saling berkaitan.

Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan cakupan data yang lebih luas, baik dari segi periode waktu maupun wilayah penelitian, serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks agar hasil yang diperoleh lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji kondisi ketenagakerjaan berdasarkan sektor ekonomi tertentu sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.